

Pengelolaan Dalam Penyediaan Transportasi Public Pemerintah DKI Jakarta Dengan Konsep *Dynamic Governance*

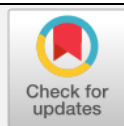
Madi Ramadhan^{1*}

¹Jurusan Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 14350, Jakarta-Indonesia

*Korespondensi: madiramadhan45@gmail.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:
Research Article



Dikirim: 13 Februari, 2023;
Diterima: 14 Februari, 2023;
Dipublikasi: 28 Februari, 2023;



Copyright © 2023. Owned by
Author(s), published by JSC

This is an open-access article.
License: Attribution-
NonCommercial-ShareAlike
(CC BY-NC-SA)

How to cite:

Ramadhan, M. 2023.
Pengelolaan Dalam Penyediaan
Transportasi Public Pemerintah
DKI Jakarta Dengan Konsep
Dynamic Governance. *Journal of*
Social Contemplativa. 1(1); 1-12.

ABSTRAK

Kemajuan saat ini tidak menjamin kelangsungan hidup di masa depan. Tantangan lain di dunia saat ini adalah inovasi teknologi yang berkembang begitu cepat dan membuat banyak kebijakan menjadi usang dan membuka kemungkinan-kemungkinan baru. DKI Jakarta memiliki masalah transportasi yang cukup rumit. Permasalahan lalu lintas saat ini adalah kepadatan lalu lintas yang masih sulit untuk dipecahkan. Namun, ada persoalan lain, yaitu angkutan umum yang tidak terintegrasi menjadi tantangan besar bagi Pemprov DKI Jakarta. Dalam konteks inilah, konsep dynamic governance menjadi tren saat ini sebagai sebuah jawaban jitu atas tantangan yang dihadapi oleh pemerintah di berbagai Negara. Culture; Institutional culture, Capabilities; Thinking ahead, thinking again, thinking across dan Change; Adaptive policy digunakan sebagai dimensi untuk menganalisis kapabilitas dynamic governance dalam penyediaan transportasi publik di DKI Jakarta. Pengumpulan informasi melalui telaah literatur dan dokumentasi. Teknik studi literatur digunakan untuk menggali informasi dari berbagai sumber seperti dokumen resmi kebijakan pemerintah, publikasi perusahaan, makalah, jurnal, dan publikasi lainnya termasuk media online. Pemerintah DKI Jakarta terus mengalami perubahan dalam pelayanan transportasi publik, mulai dari pembangunan MRT dan Kereta Cepat, selain itu juga berinovasi pada kartu pembayaran yang terintegrasi.

Keywords: *Dynamic Governance; Transportasi Publik; Pelayanan Publik;*

1. Pendahuluan

Ketidakpastian dan perubahan yang cepat membuat lingkungan global sulit diramalkan oleh bangsa-bangsa. Kemajuan teknologi sekarang bukanlah jaminan kelangsungan hidup esok hari. Sekalipun seperangkat nilai, aturan, dan praktik dimulai dengan langkah yang tepat, jika tata kelola pemerintah tetap tidak berubah dan status *quo* dipertahankan, hal itu dapat menghambat kemajuan dan menyebabkan stagnasi atau bahkan kemunduran. Institusi pemerintah harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi, berinovasi, dan bertransformasi agar tetap relevan dan efektif dalam konteks global yang dinamis dan tidak dapat diprediksi. (Neo & Chen, 2007; Idrus, et.al, 2023). Masyarakat modern menghadapi kesulitan tambahan karena pesatnya perkembangan teknologi, yang membuat banyak peraturan menjadi tidak relevan sekaligus menciptakan peluang baru yang menarik. Demikian pula, ketika masyarakat berkembang dan lebih banyak individu mendapatkan akses ke kesempatan pendidikan yang lebih maju dan kemajuan global, lebih banyak orang diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan public (Idurs & Ferdian, 2019). Kecenderungan serupa dapat dilihat dalam kompleksitas masalah sosial, yang memerlukan pendekatan multifaset dan kerja sama antar lembaga untuk mengatasi masalah ketidakpastian dan ambiguitas yang meningkat dalam konsekuensi dan koordinasi dengan berbagai lembaga (Neo, 2019; Neo & Chen, 2007). Ombudsman DKI Jakarta yang dikutip dalam situs merdeka.com mengatakan, "Jabodetabek masih memiliki banyak masalah terkait pelayanan publik yang perlu dibenahi, seperti UPT, dan pelayanan dasar dan strategis lainnya seperti Adminduk, Perizinan, Kesehatan dan Pendidikan, khususnya terkait PPDB 2022 yang saat ini menjadi fokus.", dikutip dari (www.merdeka.com, Juli 2022 diakses pada 26 Januari 2023). Pernyataan Ombudsman tentunya menjadi bahan evaluasi untuk Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki oleh Pemda. Era milenial dan perkembangan zaman yang cepat Pemerintah diuntut agar bisa memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Pemerintah dituntut agar mampu memberikan pelayanan dengan cepat. Namun, dasar-dasar tata kelola pemerintahan selalu memiliki tuntutan, karena akan selalu ada kebutuhan akan administrasi yang efisien dan efektif. Laju perubahan di era modern yang baru belum pernah terjadi sebelumnya, dan ini menggeser penekanan dari pembentukan sistem penyelenggaraan pemerintah secara tradisional ke arah pengembangan sistem yang lebih

inovatif dan responsif. Hal ini tidak hanya terlihat pada kemampuan pemerintah untuk membuat, memberlakukan, dan mengawasi berbagai kebijakan.

Masalah transportasi di DKI Jakarta sangat rumit. Kemacetan dalam sistem transportasi merupakan tantangan yang terus-menerus saat ini. Hanya sekitar 7 persen Jakarta benar-benar tertutup jalan raya, dengan DKI Jakarta menjadi pelanggar terburuk. Jika kita berbicara tentang wilayah metropolitan utama di negara-negara industri, maka 12-15 persen dari total wilayah kota harus dikhususkan untuk jalan raya. Kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta memang disebabkan oleh banyak faktor selain luas jalan yang belum ideal untuk ukuran jalanan kota besar. Faktor – faktor penyebabnya antara lain yaitu: Masyarakat DKI Jakarta secara keseluruhan masih berpandangan bahwa mobil pribadi sangat penting untuk kehidupan sehari-hari, dan kebutuhan akan mobilitas sangat tinggi. BPS memproyeksikan jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta pada tahun 2020 akan mencapai 20.221.821 unit (Jakarta.bps.go.id). Kota-kota, terutama yang memiliki populasi sementara atau bermigrasi, memiliki kewajiban untuk menyediakan berbagai layanan publik kepada penduduknya, dan angkutan umum adalah salah satu yang paling mendasar. Karena berfungsi sebagai ibu kota provinsi DKI Jakarta, ibu kota negara Indonesia, dan pusat komersial Indonesia, kota Jakarta memainkan peran penting dalam pembangunan negara. Sebagai kota dengan volume aktivitas sehari-hari yang tinggi, wajar jika berbagai layanan publik tersedia bagi warganya.

DKI Jakarta terkenal dengan kepadatan penduduknya yang tinggi dan statusnya sebagai masalah yang sulit diselesaikan. Kepadatan penduduk DKI Jakarta juga mempengaruhi ketersediaan layanan dan beratnya masalah yang ada. Masalah angkutan umum menjadi perhatian lain. Angkutan umum seperti sepeda, skuter, mobil, dan kendaraan lainnya merupakan kebutuhan pokok bagi warga DKI Jakarta. Walaupun terlihat jelas bahwa DKI Jakarta cukup banyak belakangan ini. Upaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik pada warga DKI Jakarta (Zakiah, & Fadiyah, 2020). Pembangunan sarana dan prasarana DKI Jakarta saat ini, serta infrastruktur transportasi, jauh lebih unggul dari keadaan sebelumnya. Pemerintah DKI Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui inisiatif seperti proyek Modernisasi Rapid Transit (MRT), pertumbuhan armada Trans Jakarta, dan pemeliharaan jalan. DKI Jakarta, sebagai pusat kota, tentu memiliki pilihan angkutan umum yang sangat baik. Namun, kemajuan infrastruktur saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah transportasi di DKI Jakarta, perlu diciptakan sistem transportasi umum yang

terintegrasi sehingga dapat mengubah pemikiran masyarakat yang sebelumnya menganggap transportasi umum tidak nyaman atau sulit (Mashpufah, 2021).

Namun, saat ini yang menjadi permasalahan pada pelayanan publik transportasi publik adalah belum mampu untuk menampung dengan maksimal atas kebutuhan masyarakat di Jakarta mengingat kepadatan penduduk dan pengguna transportasi publik. Selain itu, transportasi publik di Jakarta belum semuanya terintegritas satu sama lain. Moda-moda transportasi di DKI Jakarta sudah banyak model yang beroperasi di jalan-jalan Jakarta, tetapi belum terintegrasi satu sama lain. Integrasi yang dibahas disini mencakup beberapa aspek, antara lain rute, sistem ticketing dan manajemen. Ketika ketiga (aspek) ini terintegrasi, masyarakat bisa mendapatkan layanan transportasi umum yang nyaman. Transportasi publik merupakan bagian dari pelayanan publik yang wajib disediakan negara untuk aksesibilitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Ada kebutuhan mendesak bagi lembaga-lembaga negara agar cukup fleksibel untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh percepatan perubahan. Perilaku manusia terkenal sulit diprediksi, dan perubahan lingkungan hanya akan memperburuknya. Populasi yang selalu bepergian saat ini mengharapkan layanan pemerintah sama nyaman dan cepatnya (Wardani, 2019). Efisiensi kelembagaan menjadi landasan nilai berkelanjutan dari pelayanan publik yang kreatif dan kompetitif, serta sangat penting untuk mengikuti tren dan kesulitan pelayanan publik untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Tantangan saat ini membutuhkan pertimbangan yang matang, dan tindakan tegas diperlukan untuk menghilangkannya. (Alim, 2022).

Tata pemerintahan yang baik dan kebijakan yang baik saja tidak cukup, terbukti dengan kompleksitas masalah yang dihadapi oleh pemerintah di seluruh dunia. Inilah sebabnya mengapa memiliki pemerintahan yang dapat menangani situasi ini sangat penting. Dalam hal ini, gagasan tata kelola dinamis semakin populer sebagai solusi terbaik untuk masalah yang harus dihadapi pemerintah di berbagai negara (Rahmatunnisa, M. 2019). Definisi modern tentang "tata kelola dinamis" menekankan pentingnya kemampuan pemerintah untuk menanggapi keadaan yang berubah dengan mengubah konten dan proses kebijakan dan program publik untuk melayani kepentingan jangka panjang warga negara dengan lebih baik (Fauzi, 2017). Karena pertumbuhan teknologi informasi yang eksponensial, gagasan manajemen dinamis telah meledak popularitasnya di milenium saat ini. Ini karena adopsi alat berbasis Internet secara luas untuk bisnis dan tujuan lainnya (Rahmatunnisa, 2019).

Birokrasi, yang merupakan contoh dari institusi pemerintah yang dinamis, telah terbukti memiliki efek positif pada pembangunan dan kemakmuran suatu negara (Neo & Chen, 2007) dengan menunjukkan pola penyesuaian adaptif dalam menanggapi pergeseran lingkungan sosial ekonomi di mana orang melakukan transaksi bisnis dan pemerintah berinteraksi dengan berbagai kebijakan dan pengawasan. Untuk negara, tetapi yang lebih penting untuk kebaikan masyarakat. Di dunia global saat ini, pemerintah di seluruh dunia harus mengambil tanggung jawab untuk menerapkan strategi guna mencapai tata kelola yang dinamis. Terakhir, pemerintah menghadapi berbagai tekanan untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan berbagai industri dan gaya hidup. Mengembangkan dan menegakkan kebijakan pemerintah yang dapat menyesuaikan diri dan menanggapi perubahan kondisi lingkungan membutuhkan landasan tata kelola yang dinamis. Dengan kemampuan ini, pemerintah dapat lebih mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan pada analisis permasalahan di DKI Jakarta, maka peneliti akan menganalisis bagaimana pengelolaan pemerintah DKI Jakarta dalam penyediaan transportasi yang terintegritas berdasarkan pada implikasi dari Konsep *dynamic governance*. Adapun konsep yang digunakan untuk analisis yaitu terdapat *Culture; Institutional culture, Capabilities; Thinking ahead, thinking again, thinking across* dan *Change; Adaptive policy*.

2. Metode Penelitian

Penelitian kepustakaan digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini. Istilah tinjauan pustaka, tinjauan sastra, kajian teoretis, landasan teori, tinjauan pustaka, dan tinjauan teoretis semuanya sinonim untuk "studi pustaka". Ketika orang berbicara tentang "penelitian perpustakaan," mereka biasanya berarti penelitian berdasarkan sepenuhnya pada karya tulis, baik akademik atau lainnya. (Embun, 2012). Pengumpulan informasi melalui telaah literatur dan dokumentasi. Teknik studi literatur digunakan untuk menggali informasi dari berbagai sumber seperti dokumen resmi kebijakan pemerintah, publikasi perusahaan, makalah, jurnal, dan publikasi lainnya termasuk media *online*. Terlepas dari penampilannya, tinjauan literatur adalah proses yang memakan waktu yang memerlukan ketekunan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan, hasil analisis, dan kesimpulan yang ditarik sejalan dengan hasil yang diinginkan. Ini membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat. Menemukan kesimpulan yang bermakna dalam tinjauan literatur membutuhkan peneliti yang berpengalaman untuk masuk

lebih dalam. Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan pencarian jurnal penelitian yang dipublikasikan di internet menggunakan *Research Gate*, dan *Schoolar*. Selain jurnal juga melakukan studi literatur dari media online. Misalnya saja yang dilakukan peneliti pada tahap awal penulisan dengan menelusuri berita media permasalahan pelayanan publik di Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal mengenai deskripsi permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (<https://jakarta.bps.go.id/>) memperkirakan jumlah penduduk kota ini pada September 2020 mencapai 10,56 juta jiwa. Jumlah penduduk DKI Jakarta bertambah sejak sensus terakhir diperhitungkan. Selama dekade terakhir, mulai tahun 2010, DKI Jakarta mengalami ledakan populasi hampir 954 ribu orang, atau tingkat pertumbuhan tahunan sekitar 88 ribu. Merujuk pada data kependudukan DKI Jakarta, menjadi penyumbang kemacetan di DKI Jakarta. Kemacetan Jakarta cenderung terjadi pada pagi, siang, dan malam hari kerja, ketika orang-orang dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja. Karena sebagian besar orang berangkat kerja sekitar pukul 07.00 dan 09.00 WIB, pada saat inilah kemacetan lalu lintas pagi paling parah. Kemudian, pada sore hari, antara pukul 17.00 dan 19.00 WIB, para pengemudi di-backup karena sudah menjadi jadwal keberangkatan mereka dari kantor. Untuk mengurai kemacetan di DKI Jakarta, diperlukan suatu kebijakan yang inovatif dan dinamis. Khususnya kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan transportasi publik. Pertumbuhan dan kemakmuran suatu negara, dan khususnya sektor perdagangan dan industrinya, sangat bergantung pada kondisi infrastruktur transportasinya. Namun, transportasi umum yang tidak memadai terkadang menjadi pemecah masalah bagi penduduk kota. Kota-kota besar di seluruh Indonesia, termasuk Jakarta, dikabarkan menghadapi masalah transportasi yang sulit.

Status DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi negara memperjelas pentingnya angkutan cepat yang andal bagi penduduk di kawasan ini. Sesuai dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pola Transportasi Makro, Pemerintah DKI Jakarta telah menyiapkan kebijakan pelaksanaan PTM. Untuk mewujudkan sistem transportasi yang tidak hanya andal, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan Provinsi DKI Jakarta

sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kebijakan PTM dalam kerangka Transportasi Makro Pola sedang diterapkan. Tujuan dari kebijakan PTM ini adalah untuk memfasilitasi terwujudnya jaringan transportasi yang efisien, efektif, lancar, dan terpadu. Kebijakan perluasan akses transportasi umum, pengendalian kemacetan lalu lintas, dan perluasan jaringan eksisting adalah bagian dari PTM. (Sinaga, et.al, 2019).

Pemecahan permasalahan transportasi publik dan tuntutan zaman yang terus berkembang. Menciptakan layanan transportasi publik yang inovatif dan integritas menjadi menjadi jawaban dari permasalahan yang ada. Melalui konsep *dynamic governance*, pemerintah harus terus responsif dan dinamis dalam menghadapi permasalahan dan perkembangan zaman (Ferdian, et.al, 2021), khususnya pada pelayanan transportasi publik di DKI Jakarta. Dimana transportasi publik DKI Jakarta masih menjadi masalah utama yang perlu diselesaikan. Berdasarkan konsep *dynamic governance*, kebijakan pemerintah DKI Jakarta dalam penyediaan transportasi pelayanan publik saat ini yaitu:

a. Culture; Institutional culture

Nilai-nilai warisan budaya bangsa (budaya kelembagaannya) menjadi landasan proses terciptanya pemerintahan yang efektif. Pada gilirannya, tindakan orang akan dibentuk oleh norma-norma budaya mereka.

Perilaku akan dipengaruhi oleh nilai kearifan lokal, yang meliputi norma budaya, kepercayaan, struktur sosial, dan rutinitas. Norma dan praktik informal yang berkembang sebagai hasil dari kearifan lokal ini. Hal itu, pada gilirannya, akan menjadi faktor utama dalam evolusi berbagai kebijakan.

Nilai budaya yang di terapkan dalam pelaksanaan pelayanan transportasi publik di DKI Jakarta adalah sikap senyum, salam dan sapa. Sikap ini merupakan salah satu nilai sikap yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan menjadi kearifan lokal tersendiri dalam pelayanan transportasi publik.

b. Capabilities; Thinking ahead.

Thinking ahead berarti menyadari faktor-faktor eksternal yang akan membentuk cara pelaksanaan pembangunan di masa depan, memahami dampak faktor-faktor ini terhadap

tatanan sosial dan ekonomi masyarakat, dan mengenali peluang investasi yang akan terjadi. memungkinkan komunitas itu untuk mengambil keuntungan penuh dari tren yang muncul. Salah satu penerapan *Thinking ahead* dalam kebijakan transportasi publik di DKI Jakarta adalah inovasi pembangunan transportasi publik MRT dan Kereta Cepat yang masih dalam progress pembangunan. Pembangunan MRT di DKI Jakarta salah satu bentuk dari Pemerintah untuk memberikan pelayanan publik transportasi yang cepat. Namun, pembangunan MRT ini masih belum terintegrasi di wilayah DKI Jakarta. Pembangunan Kereta Cepat juga diharapkan sebagai moda transportasi yang dapat menarik investor dan meningkatkan perekonomian antara Jakarta dan Bandung. Selain itu menciptakan transportasi publik yang integritas, berarti terintegrasi menjadi satu kesatuan yang utuh. Untuk mengembangkan keterpaduan angkutan umum dapat dilakukan melalui penyediaan fasilitas pelayanan terpadu, yang mampu menjamin efisiensi dan efektifitas yang tinggi dalam penyelenggaraannya. Pemprov DKI Jakarta berupaya mengintegrasikan layanan transportasi ke wilayah DKI Jakarta melalui Kementerian Perhubungan dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

c. *Capabilities; Thinking again*

Pada konsep *dynamic governance*, kebijakan yang dibuat selalu mengacu pada proses merefleksikan. Artinya dituntut untuk merefleksikan apa yang telah dilakukan (*thinking again*). Proses merefleksikan ini dilakukan agar kita dapat melihat sejauh mana kebijakan itu dapat menjawab permasalahan yang ada. Pada permasalahan penyediaan transportasi publik, pemerintah DKI Jakarta berdasarkan pada analisis peneliti melihat kondisi yang ada telah menerapkan *thinking again* dilihat dari adanya berbagai transportasi publik yang ada di DKI Jakarta. Ketika kita mundur kebelakang, bahwa transportasi publik DKI Jakarta dulu hanya tersedia angkutan umum. Namun, untuk menjawab perkembangan zaman, DKI Jakarta dalam Transportasi publik mengalami perubahan terus menerus hingga saat ini tersedia berbagai macam seperti KRL, MRT hingga pembangunan kereta cepat. Saat ini, angkutan umum di DKI Jakarta dikenal dengan JatLingko, dimana angkutan umum yang di desain secara modern yaitu angkutan umum yang terintegritas dan penggunaan kartu pembayaran digital. Angkutan umum DKI Jakarta juga sudah di desain lebih aman dan nyaman seperti angkutan umum ber-AC. Perubahan – perubahan yang terjadi dalam penyediaan transportasi publik di DKI Jakarta,

adalah salah satu bentuk dari proses merefleksikan dari transportasi publik yang sebelumnya telah ada. Proses merefleksikan tersebut dapat melihat sejauh mana transportasi publik yang diterapkan dapat menjawab permasalahan yang ada. Ketika tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada maka dilakukan terus inovasi – inovasi dalam penyediaan transportasi publik. *Thinking again* berubah dari *nice-to-have* menjadi *must-have* bagi setiap pejabat tinggi dalam birokrasi atau organisasi. *Thinking again* menjadi bagian dari mengevaluasi kebijakan yang sudah diterapkan.

d. Capabilities : Thinking across

Thinking across atau belajar dari perspektif orang lain adalah inti dari gagasan pemerintahan yang dinamis. Untuk mengatasi masalah dengan layanan transportasi umum, kita dapat mencari atau memperoleh informasi, peraturan, dan struktur baru untuk menanggapi kondisi yang berubah. Pada studi penyediaan transportasi publik di DKI Jakarta, tentunya pemerintah melakukan pembelajaran dari berbagai Negara di Dunia. Misalnya, pada Juni 2022, pemerintah Indonesia dan Inggris bekerja sama untuk meningkatkan jumlah pilihan angkutan umum massal perkotaan, termasuk Bus Rapid Transit (BRT) dan sektor perkeretaapian berbasis rel, yang terintegrasi dan juga menggunakan energi listrik, sebagai dilaporkan di <https://dephub.go.id/>.

e. Change; Adaptive policy.

Kebijakan ini diadaptasi secara aktif melalui pengenalan ide-ide baru, penyempurnaan yang sudah ada, dan prosedur baru. Selain dalam inovasi kebijakan transportasi publik, untuk mengikuti perkembangan zaman pemerintah DKI Jakarta menciptakan, Integrasi sistem pembayaran terpadu untuk semua angkutan umum di Jakarta sehingga dapat sangat bermanfaat bagi pengguna transportasi publik di Provinsi DKI Jakarta dan untuk meminimalkan metode pembayaran biaya perjalanan. Berkat pembayaran yang terintegrasi, pengguna angkutan umum hanya dapat menggunakan satu tiket untuk beberapa moda transportasi dalam jangka pendek (harian) atau jangka panjang (top-up). Selain itu juga inovasi aplikasi Moovit dimana merupakan Integrasi jadwal berupa konsistensi data jadwal kedatangan dan keberangkatan angkutan umum sehingga tidak terjadi antrean di stasiun kereta api atau bus. Masyarakat DKI Jakarta kini dapat berganti moda transportasi dengan menyesuaikan waktu kedatangan dan keberangkatan di

stasiun bus dan kereta api dengan aplikasi Moovit yang dapat membantu pengguna transportasi publik (Handayani, dkk 2021).

Dalam penerapan dynamic governance di Indonesia konsep Culture; Institutional culture tidak boleh terpisahkan. Meskipun kebijakan yang dibuat harus dinamis menerima perubahan lingkungan namun aspek nilai-nilai kearifan lokal tidak boleh dilupakan dalam pengimplemntasian sebuah kebijakan atau inovasi. Nilai – nilai kearifan lokal merupakan nilai yang sejatinya, semodern apapun transportasi publik yang ada namun nilai dan sikap – sikap kearifan lokal di Indonesia harus dilibatkan seperti budaya senyum, salam dan sapa dalam memberikan pelayanan publik. *Dynamic governance* juga mengenal penerapan *Thinking ahead*, *Thinking again*, dan *thinking across* dalam proses kebijakan. Hak pilihan dan aspirasi pemimpin sangat penting di sini. Aturan, hukum, dan struktur perlu diperbarui secara teratur untuk memperhitungkan realitas dunia saat berkembang dan berevolusi. Ambisi pemimpin ini dilakukan agar dapat menjamin keberlangsungan hidup masyarakat. Selain itu dibutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan dinamis dalam mengelola bermacam elemen secara terintegrasi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa laju perubahan terus meningkat, memerlukan strategi yang terdefinisi dengan baik, manajemen yang cerdas, pendidikan berkelanjutan, pencarian jalur yang relevan dan adaptif, serta implementasi kebijakan yang efisien.

4. Simpulan

Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah di berbagai belahan dunia perlu memiliki kemampuan strategis "*dynamic governance*" agar dapat bersaing dalam ekonomi global modern. Berbagai sektor dan aspek kehidupan sedang mengalami perubahan, yang mengakibatkan banyaknya permintaan pemerintah untuk menyesuaikan diri. Tata kelola yang dinamis menjadi landasan penting untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan pemerintah yang beradaptasi dan merespons perubahan lingkungan. Pemerintah DKI Jakarta erus mengalami perubahan secara dinamis dan menciptakan pelayanan moda transportasi publik yang mudah dan terintegritas. Berbagai inovasi sudah dilakukan, namun tentunya masih banyak hal yang perlu dibenahi. Mengingat DKI Jakarta sebagai pusat ibu kota dan pusat perekonomian, menjadi salah satu tujuan migrasi oleh masyarakat daerah. Pemerintah DKI Jakarta menghadapi kesulitan dalam hal ini,

karena harus tetap fleksibel dan adaptif untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

6. Pernyataan Conflicting Interests

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

References

- Alim, B. N. (2022). Upaya Mewujudkan Dynamic Governance Pada Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2).
- Fauzi, L. M., & Iryana, A. B. (2017). Strategi Dynamic Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 13-30.
- Ferdian, K. J., Faedlulloh, D., & Ibrahim, I. (2021). Birokrasi, Disrupsi, dan Anak Muda: Mendorong Birokrat Muda menciptakan Dynamic Governance. *Jurnal Transformative*, 7(1), 112-127.
- Handayani, S., Afrianti, D. A., & Suryandari, M. (2021). Implementasi Kebijakan Angkutan Umum di DKI Jakarta. *Jurnal Teknologi Transportasi dan Logistik*, 2(1), 19-28.
- Idrus, I. A., & Ferdian, K. J. (2019). Implementasi Pelayanan Publik Pada Program SIDUKUN 3 In 1 Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Di DKI Jakarta. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 1(2), 193-204.
- Idrus, I. A., Suryono, A., Noor, I., & Amin, F. (2023). Education Policy Innovation in Dynamic Governance Perspective in North Luwu District Education Programs. *Resmilitaris*, 13(2), 1159-1176.

- Mashpufah, R. N. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Mengatasi Permasalahan Transportasi di Perkotaan. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(4), 291-296.
- Neo, B. S., & Chen, G. (2007). *Dynamic governance: embedding culture, capabilities and change in Singapore*. New Jersey: World Scientific.
- Rahmatunnisa, M. (2019). Dialektika konsep dynamic governance. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 2(02).
- Sinaga, S. M., Hamdi, M., Wasistiono, S., & Lukman, S. (2019). Implementasi Kebijakan Angkutan Umum Massal Berbasis Bus Rapid Transit (BRT) Dalam Mewujudkan Sistem Transportasi Publik Perkotaan Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Di Provinsi DKI Jakarta. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 2(3), 203-220.
- Wardani, A. K. (2019). Urgensi Inovasi Pelayanan Bidang Administrasi Publik di Era Disrupsi. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(2).
- Zakiah, U., & Fadiyah, D. (2020). Inovasi Pelayanan Transportasi Publik Ramah Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta. *Administratio*, 11(1), 29-36.

Tentang Penulis

Madi Ramadhan, Saat ini penulis sebagai Mahasiswa di Jurusan Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.